

ANALISIS PERBANDINGAN PENGELOLAAN KOALISI DAN KINERJA KEPEMIMPINAN ANTARA PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN PRESIDEN JOKO WIDODO

¹Efriza; ²Rochendi Suryadinata

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Sutomo, Serang, Banten
email: ¹efriza10099@unpam.ac.id; ²rochendi10034@unpam.ac.id

Paper Accepted: 30 September 2022
Paper Reviewed: 3-13 Oktober 2022
Paper Edited: 14-22 Oktober 2022
Paper Approved: 25 Oktober 2022

ABSTRAK

Penelitian ini membahas untuk membandingkan pengelolaan koalisi dan kinerja kepemimpinan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam pengelolaan koalisi yang menjadi penelitian ini juga teruraikan mengenai relasi kekuasaan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama satu dekade kepemimpinan Presiden SBY dan juga delapan tahun dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Kedua pemerintahan ini punya satu persamaan acap kali terjebak dalam ketegangan antarlembaga disebabkan oleh desain dari koalisi yang dibangun dalam model pemerintahan presidensial. Meski Indonesia, menerapkan sistem presidensial, tetapi kebutuhan koalisi dianggap sebagai hal utama bagi pemerintahan. Ini disebabkan lemahnya karakter institusional partai politik di DPR yang turut memengaruhi hubungan saling pengaruh dan mempengaruhi antara presiden dan DPR, serta persepsi diri presiden berhadapan dengan DPR. Situasi pemerintahan ini juga turut berdampak terhadap kepemimpinan kedua presiden yang dianggap oleh masyarakat lebih sibuk dalam persoalan politik dibandingkan memikirkan persoalan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa metode deskriptif kualitatif dan juga menggunakan studi kasus bersifat instrumental untuk menjelaskan mekanisme perbandingan antara pengelolaan koalisi dan kinerja kepemimpinan dari Presiden SBY dengan Presiden Jokowi. Studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai pengelolaan koalisi dan hubungan antara Presiden dan DPR dalam kerangka sistem presidensial.

Kata Kunci: Sistem Presidensial, Koalisi, Kepemimpinan, Sistem Multipartai

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era Reformasi telah melakukan pembatasan terhadap kewenangan konstitusional presiden. Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kewenangan presiden jelas lebih

kecil dan terbatas dibandingkan presiden sebelum reformasi (Denny Indrayana 2011: 71). Realitasnya, dua presiden Indonesia yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat yakni Presiden SBY

dan Jokowi, keduanya dapat terpilih melalui hingga dua periode. SBY dapat menyelesaikan periode pertama dan keduanya. Hal yang sama juga akan terjadi pada pemerintahan presiden Jokowi yang saat ini sedang menjalani dua periode sisa dari akhir kepemimpinannya. Keberhasilan keduanya menunjukkan kukuhnya pondasi sistem presidensial yang dikuatkan melalui Amandemen UUD 1945 selama empat tahun pada tahun 1999 sampai 2002.

Pasca Amandemen UUD 1945 ada harapan besar bahwa presiden ke depannya mempunyai legitimasi yang kuat dan rakyat juga memiliki kesempatan yang luas untuk memilih dan menilai sendiri calon pemimpinnya. Pemilihan Presiden secara langsung (Pilpres) oleh rakyat telah memberikan legitimasi politik yang kuat bagi presiden. Sehingga Presiden semestinya tidak perlu terikat oleh fraksi-fraksi politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebab pengaturan Amandemen UUD 1945 juga menunjukkan presiden tidak mudah dijatuhkan oleh DPR. Sehingga, dengan melalui Pilpres telah memberikan kepada setiap warga negara juga turut memberikan penilaian dan pilihan terhadap calon-calon presiden, maka hubungan presiden dan masyarakat semakin menguat karena saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Tetapi peluang bagi munculnya kembali konflik dan ketegangan politik dalam relasi Presiden dan DPR relatif besar. Sehingga, lagi-lagi koalisi "besar dan tambun" menjadi jalan keluar, berkaca dari pengalaman SBY, maka Presiden Jokowi akhirnya rela mengingkari janjinya mewujudkan koalisi tanpa syarat dengan bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar dalam koalisi pendukung pemerintahan. Bahkan, di periode kedua pemerintahannya, Presiden Jokowi malah mengajak Partai Gerindra untuk bergabung dalam pemerintahan, yang notabene merupakan kompetitor pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Fenomena politik janggal ini dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Partai Gerindra diajak untuk membangun persatuan dan kesatuan nasional dari negara Indonesia dan mendukung upaya mengawal pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dari Pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian, Presiden Jokowi juga memperluas koalisi pemerintahan menjadi lebih besar (obesitas) dengan bergabungnya PAN sebagai pendukung pemerintahan. Akhirnya, oposisi pemerintah hanya menyisakan dua partai yakni Partai Demokrat (PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan total jumlah 104 kursi atau hanya 18,1 persen dari keseluruhan kursi di parlemen (kompas.com, 1 September 2021).

Langkah-langkah politik pragmatis itu didasari karena hasil perubahan UUD 1945 justru memperbanyak titik singgung kedua lembaga ini, meski begitu, ayunan bandul kekuasaan lebih condong "sarat DPR" sehingga purifikasi pasca perubahan UUD 1945 tidak mampu menghilangkan karakter sistem parlementer dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Serta pilihan atas kombinasi sistem multipartai dengan sistem pemerintahan presidensial yang nyatanya adalah berbahaya (*innimical*) untuk stabilitas politik dan pemerintahan maka argumentasi menyertainya adalah yang mendasari perlunya koalisi "gemuk" demi stabilitas dukungan politik di parlemen. Sebab, partai yang tidak bergabung bisa membentuk poros oposisi di parlemen. Kekhawatiran ini yang ditenggarai ada dibenak dua pemimpin yang terpilih melalui Pilpres langsung oleh rakyat ini.

Dukungan partai-partai politik yang mayoritas di pemerintahan dan parlemen adalah keniscayaan bagi sistem presidensial di dalam benak pikir dari Presiden SBY dan Presiden Jokowi tersebut. Kedua Presiden ini merasa masih membutuhkan dan memunyai masalah dari *political support*. Sebab, partainya pemerintah tidak memiliki kursi mayoritas

mutlak di parlemen. Dengan kontrol dari DPR di era Reformasi yang menguat, sedangkan presiden tidak didukung oleh satu partai politik yang mayoritas mutlak, maka akhirnya pola kepemimpinan dan pengelolaan koalisi dibangun dengan atas dasar koalisi yang bersifat 'tambun.'

Struktur politik kepartaian jelas turut memengaruhi kondisi yang tidak kondusif bagi sistem presidensial disebabkan oleh sistem multipartai ekstrem dan terfragmentasi, bahkan turut pula didukung oleh absurditas politik dari sepak terjang partai-partai politik dalam berkoalisi. Implikasinya, selama satu dekade kepemimpinan SBY kian menunjukkan wajahnya yang lemah sebagai presiden, sehingga presiden lebih sering memosisikan dirinya dalam posisinya yang terjepit dalam pertarungan partai politik di parlemen. Kepemimpinan politik SBY dalam mengelola pemerintahan juga lambat-laun semakin terekspos kelemahan pemerintahan untuk menghadapi tekanan-tekanan politik dari sistem multipartai.

Begitu juga awal tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi hingga sudah berjalan delapan tahun lebih pemerintahannya sekarang ini. Pemerintahan Jokowi dianggap lebih dilematis, karena Jokowi bukan petinggi partai malah sekadar "petugas partai". Sehingga, Jokowi harus menerima kenyataan pahit, pemerintah cenderung direpotkan oleh ketidaksolidan dukungan dari partainya sendiri yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). PDI Perjuangan sebagai partainya pemerintah malah memilih sebagai mitra kritis dari pemerintah hal yang begitu anomali.

Pemerintahan Jokowi berusaha menyelesaikan problema dari karakter pemerintahannya yang dianggap rapuh, dengan membangun karakter pemerintahan agar kuat. Presiden Jokowi melakukan upaya memperluas koalisi pendukung pemerintah. Banyak partai politik akhirnya memilih menjadi partai-partai pendukung pemerintahan, padahal

sebelumnya adalah barisan partai-partai oposisi pemerintahan. Pola menguatnya pendukung pemerintahan Presiden Jokowi tak bisa dilepaskan dari pola-pola bagi-bagi kursi jabatan semata, agar kekuasaan pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan baik, utamanya dalam berhadapan dengan DPR. Wajar akhirnya, komposisi jumlah kementerian tetap jumlahnya tidak jadi diperkecil namun jumlah jabatan wakil menteri diperluas untuk mengakomodasi dukungan-dukungan dari berbagai partai-partai kepada pemerintah.

Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan koalisi dalam kepemimpinan politik antara pemerintahan SBY dengan pemerintahan Jokowi sekarang ini?
2. Mengapa Pemerintahan SBY dan Jokowi cenderung memperluas koalisi partai-partai politik pendukung pemerintahannya?

Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Analisis dengan melakukan perbandingan untuk mengetahui dan memahami mengenai Pengelolaan Koalisi dalam Kepemimpinan Politik Antara pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi.
2. Analisis dengan melakukan perbandingan juga untuk mengetahui dan memahami alasan dari upaya memperluas pemerintahan dalam pemerintahan SBY dan Jokowi.

Waktu dan Tempat Penelitian

Bahan penelitian (obyek penelitian) adalah eksekutif utamanya mantan Presiden SBY dan Presiden Jokowi, dengan unit analisisnya adalah pengelolaan koalisi dan kinerja kepemimpinan dari Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Sehingga dari obyek penelitian juga menjelaskan bahwa waktu dan tempat penelitian adalah dalam

lingkup pusat (nasional), alasan dari pemilihan lokasi ini sebab menjelaskan kepada fokus penelitian yang menjelaskan pengelolaan koalisi dan kinerja kepemimpinan dari dua presiden tersebut. Berdasarkan pemahaman akan obyek penelitian dan unit analisis, serta lokasi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan desain penelitian kualitatif. Desain kualitatif dipilih mengingat penelitian bertujuan untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam kenyataan empirik dan penelitian ini lebih banyak mempelajari dan mengeksplorasi perilaku objek dari penelitian ini. Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan penelitian lainnya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, penelitian ini juga menjelaskan bahwa peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Tujuan dipilihnya penelitian ini dengan cara pendekatan kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam, teliti, dan terdali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin baik

penelitian ini, tentu saja akan mempermudah penulis dalam melakukan proses pengumpulan data dan proses analisis data, guna menjawab rumusan permasalahan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini.

kualitas penelitian tersebut. Sisi lain, Penelitian Kualitatif dilakukan sesuai tujuannya untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci, dan melukiskan realita yang ada (Jalaludin Rakhmat, 2000: 25).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kasus. Hal mana Studi Kasus merupakan penelitian yang berfokus pada satu unit masalah atau obyek untuk menghasilkan deskripsi secara mendalam, kaya, luas dan menyeluruh. Dalam Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian menggunakan studi kasus yang bersifat instrumental (*instrumental case study*), (Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln 2009: 301). Hal mana kasus yang digunakan adalah satu dekade kepemimpinan Presiden SBY dan mendekati dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, kasus ini memainkan peranan suportif, yang memudahkan pemahaman kita tentang minat-minat yang lainnya, seperti akan membantu mengungkap tak hanya relasi kekuasaan Presiden dan DPR sesudah amandemen UUD 1945 namun juga sebelum amandemen UUD 1945 tersebut. Dalam memperoleh data atas berbagai kasus ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, surat kabar, majalah, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah dalam kajian ini (M. Nazir, 2003, dan Suharsimi Arikunto, 2003).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Melihat Kembali Pengelolaan Koalisi dan Kinerja Kepemimpinan

Hasil perubahan UUD 1945 justru memperbanyak titik singgung antara kedua lembaga yakni Eksekutif dan Legislatif. Ayunan bandul kekuasaan saat ini, realitasnya adalah lebih condong “sarat DPR,” menggantikan bandul kekuasaan sebelumnya yang “sarat presiden.” Sehingga, purifikasi pasca perubahan UUD 1945 dianggap tidak mampu menghilangkan karakter sistem parlementer dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

Hasil perubahan UUD 1945 telah memilih memadukan kombinasi sistem multipartai dengan sistem presidensial. Meski nyatanya adalah berbahaya (*innimical*) untuk stabilitas politik dan pemerintahan. Wajar argumentasi menyertai pola pikir bagi pemegang jabatan presiden bahwa diperlukan koalisi “gemuk” meski bersifat pragmatis demi stabilitas politik di parlemen. Sebab, partai yang tidak bergabung bisa membentuk poros oposisi di parlemen. Inilah yang ada di pola pikir kepemimpinan SBY kala menjabat sebagai Presiden dan juga terjadi kepada Presiden Jokowi saat ini.

Pemerintahan Presiden Jokowi awal terpilih (2014) berencana untuk membentuk koalisi ramping dan koalisi tanpa syarat. Nyatanya, ia malah terjebak terhadap realitas dibutuhkannya banyak partai politik sebagai pendukung pemerintahannya. Awalnya, pendukung pemerintahan Presiden Jokowi berdasarkan dukungan partai politik di DPR diusung oleh PDI Perjuangan dengan 129 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 47 kursi, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan 35 kursi, dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan 16 kursi; dengan total jumlah dukungan anggota parlemen sebanyak 207 anggota atau total suara di parlemen sebesar 36,96 persen.

Presiden Jokowi ketika itu, menyadari dan perlunya mengupayakan memperluas jumlah partai pendukung sebagai pendukung pemerintah. Langkah ini dilakukan oleh Pemerintah sejak 2014 hingga 2016 yakni dengan bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperoleh 39 kursi, kemudian bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 49 kursi, dan terakhir, bergabungnya Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 91 kursi. Sehingga kekuatan pendukung pemerintah akhirnya menjadi mayoritas di parlemen dengan dukungan 7 partai, sebanyak 386 anggota (kursi), atau total suara di parlemen sebesar 68,92 persen. Kebijakan ini terus dilakukan hingga di kepemimpinan Presiden Jokowi pada periode keduanya.

Pada periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi tak tanggung-tanggung saat ini kekuatan Pemerintah sebesar 81,91 persen. Jika sebelumnya, total koalisi Jokowi di parlemen berjumlah 349 kursi (60,69 persen). Setelah Jokowi dilantik, lalu menggandeng Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), maka koalisi di parlemen didukung oleh 427 kursi dari total 575 kursi anggota DPR, sehingga Jokowi nyaris ditopang oleh 75 persen anggota DPR. Nyatanya, Presiden Jokowi masih merasa dukungan partai kepada pemerintah masih kurang ‘*digdaya*,’ maka Presiden Jokowi mengakomodir PAN. Sebelumnya, PAN tidak secara *gablang* menyatakan sebagai pendukung Jokowi, bahkan PAN malah terjadi intrik internal menjelang Kongres 2020. Akhirnya, PAN resmi bergabung dengan Partai Pendukung Pemerintahan (tirto.id, 28 Desember 2019). Dengan dukungan terakhir dari PAN maka kekuatan partai pendukung pemerintah sebanyak 7 partai dengan kursi mayoritas sebesar 471 kursi, total persentase pendukung pemerintah sebesar 81,91 persen. Hanya menyisakan kekuatan berseberangan dengan pemerintah sebanyak dua partai yakni PKS dan PD dengan total dukungan 104 kursi, total persentase 18,09 persen.

Dukungan partai-partai politik yang mayoritas di pemerintahan dan parlemen dianggap suatu keniscayaan bagi sistem

presidensial yang efektif. Presiden di era Orde Baru tidak memunyai masalah *political support*, sebab Golongan Karya (Golkar) selalu menjadi partai pendukung pemerintah yang memunyai kursi mayoritas mutlak di parlemen. Sehingga, Presiden Soeharto tidak perlu dipusingkan dengan keniscayaan perlunya koalisi di pemerintahannya. Jalannya pemerintahan dan kontrol parlemen berada di bawah kendali penuh Presiden – apalagi UUD 1945 kala itu juga *executive heavy constitution* —. tidak seperti sekarang yang bersifat “sarat DPR” Konsekuensinya, kontrol kepada Presiden ketika itu menjadi lemah. Berbeda, pada era demokratis sekarang, di satu sisi kewenangan Presiden sangat dibatasi, di sisi lain kewenangan kontrol DPR menjadi jauh lebih kuat. Di tambah lagi, Presiden tidak didukung oleh satu partai politik yang mayoritas mutlak sebagaimana era Orde Baru, bahkan mayoritas sederhana saja tidak terjadi.

Persoalan semakin kompleks dan turut mewarnai hubungan eksekutif dan legislatif pada khususnya dan pemerintahan pada umumnya selepas pemilihan presiden. Ini ditunjukkan dari peraturan-peraturan yang dipilih dan diterapkan, sebelum munculnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilu Serentak 2019. Misalnya, mekanisme Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang mendahului Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) secara mendasar membuka peluang hadirnya sebetulnya koalisi yang tidak berkarakter atau koalisi pragmatis. Kenyataannya, koalisi yang terbangun tidak dilandasi oleh sintesa ideologi atau kesamaan visi yang solid, melainkan lebih didasari oleh pemenuhan kuota pencalonan berdasarkan jumlah suara dan kursi (Syamsuddin Haris, 2014). Sayangnya, permasalahan ini masih terjadi hingga pemilihan umum (pemilu) serentak dilaksanakan, diakibatkan oleh MK tak bergeming atas berbagai *judicial review* dalam upaya menghapuskan dan/atau mengurangi persyaratan pencalonan presiden berdasarkan *presidential threshold* sebesar 20% dari jumlah kursi DPR atau

25% dari suara sah secara nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya.

Berbagai kondisi di atas juga ditopang oleh model pemilihan presiden dua putaran (*two round system*). Model mayoritas mutlak ini di satu sisi memang akan menyebabkan seorang presiden memiliki legitimasi yang kokoh dihadapan rakyat. Di sisi lain, dengan nuansa politik tak berkarakter di Indonesia, adanya pemilu presiden putaran kedua justru memberi peluang yang besar bagi partai-partai untuk alih suara demi sekadar mendapatkan posisi yang lebih baik, tanpa mengindahkan komitmen yang telah dibangun sebelumnya. Jika dikaitkan antara Pemilihan Presiden dua putaran dengan model koalisi, maka terjadi tiga tahap koalisi yang dibangun yakni, koalisi tahap pertama diperlukan untuk memenuhi minimal dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden, jika terjadi pemilu putaran kedua maka koalisi akan diperbaharui guna menghadapi putaran kedua tersebut, terakhir koalisi dilakukan guna memperbesar dukungan di DPR.

Menyadari bahwa kombinasi sistem presidensial dengan multipartai moderat tetapi dengan realitas bahwa tidak ada satu partai politik yang memperoleh suara mayoritas, berimplikasi terhadap pembentukan koalisi yang dilakukan oleh Presiden Yudhoyono kala itu, yakni membentuk *governing coalition* dan *parliamentary coalition*. Atau dengan kata lain, berupaya menghadirkan koalisi tahap ketiga tersebut, yakni dalam rangka untuk memperbesar dukungan di DPR, begitu juga yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam dua periode kepemimpinannya, konsekuensinya adalah koalisi “besar dan tambun” menjadi jalan keluar dalam pengelolaan dua periode pemerintahannya.

Sementara, di era Presiden Jokowi, kondisinya agak sedikit berbeda, sebab Pilpres dua kali dilaksanakan dengan dua pasangan calon. Tatkala Pilpres diikuti oleh dua pasangan calon, konsekuensinya tak ada Pilpres putaran kedua. Ketika Pilpres 2014 lalu, terjadi persaingan keras

antar dua kubu pasangan calon yaitu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bahkan, dua pasangan calon ini sampai melakukan “*rematch*” antar Prabowo dan Jokowi dengan cawapres yang berbeda masing-masing. Tetapi, pada 2014 lalu, persaingan keras ini ternyata terbawa hingga ke Senayan, maka terjadilah polarisasi dua kekuatan koalisi itu di parlemen. Sehingga, DPR di Senayan menghadapi persoalan dualisme kepemimpinan pasca Pemilu 2014 lalu.

Polarisasi koalisi yang terjadi sesuai preferensi dukungan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang mana Koalisi Indonesia Hebat (KIH) sebagai pendukung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla sesuai dukungan partai politik di DPR diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura dengan total jumlah dukungan anggota parlemen sebanyak 207 anggota atau total suara di parlemen sebesar 36,96 persen. Sedangkan, Koalisi Merah Putih (KMP) pendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa yang didukung partai politik di DPR pengusungnya adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKS, dan Partai Demokrat (klaimnya netral) menguasai jumlah dukungan anggota parlemen sebanyak 353 anggota atau total suara di parlemen sebesar 63,03 persen. Menghadapi pusaran konflik KIH dan KMP dalam parlemen, ternyata Koalisi Pendukung Jokowi mengalami kekalahan demi kekalahan dengan skor telak yaitu 6-0, seperti: Penetapan Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3), Penetapan Tata Tertib DPR, Pemilihan Pimpinan DPR, Pemilihan Pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan DPR, Penetapan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (lewat DPRD), dan Pemilihan Pimpinan Majelis Permusyawarata Rakyat (MPR).

Menyadari bahwa tidak mudah menjalankan politik pemerintahan dengan hanya jumlah yang sedikit dari kekuatan di parlemen, konsekuensinya Jokowi akhirnya mengabaikan koalisi ramping tanpa syarat yang digembargemborkannya saat Pilpres 2014 lalu. Ini dibuktikan dengan pemanfaatan konflik dari kepengurusan PPP atas perbedaan manuver dukungan di Pilpres 2014. KIH yang dari awal telah bermanuver untuk membangun kekuatan baru di parlemen kemudian memperluas dukungan partai koalisinya dengan bergabungnya PPP versi Romahurmuziy, respons turut dilakukan dengan menyediakan kursi dari paket calon pimpinan MPR, bahkan juga kepercayaan untuk menduduki kursi kementerian agama. Meski paket pimpinan MPR versi KIH kalah, tetapi kompensasi berupa kursi kementerian agama tetap diberikan untuk PPP.

Upaya memperluas koalisi dianggap sebagai cara untuk efektifnya jalannya pemerintahan. Presiden lebih membutuhkan *political support* ketimbang *electoral support*. Menjawab tantangan kedua tentang minimnya dukungan politik, tidak ada jalan lain, Presiden mesti melakukan upaya memperluas koalisi, politik transaksional tak bisa dihindari, akhirnya dilakukan pada dua tahun pemerintahan pertamanya. Presiden Jokowi saat itu, sibuk melakukan konsolidasi politik. Jokowi kembali melakukan hal yang dilakukan sebelumnya oleh SBY yaitu melanggengkan koalisi gemuk dan cenderung obesitas. Konsekuensinya lagi-lagi prinsip koalisi ramping tanpa syarat tidak mungkin lagi dapat diteruskan setelah dirangkulnya kembali beberapa partai di KMP menjadi koalisi pendukung pemerintahan seperti PAN dan Partai Golkar. Tentu konsekuensinya, pihak koalisi pendukung Jokowi-Jusuf Kalla perlu berbagi sumber daya, sebab, *there is no such thing as free lunch*, untuk mengakomodasinya Jokowi membagi kursi dalam *reshuffle* kabinet jilid II untuk mengakomodir bergabungnya PAN dan Partai Golkar sebagai pendukung

pemerintahan sehingga masing-masing partai memperoleh 1 kursi kementerian. Dengan masuknya PAN dan Partai Golkar sebagai pendukung pemerintah, maka otomatis KIH dan KMP bubar, malah yang terjadi adalah Partai-partai Pendukung Pemerintahan (P4), (Warta Kota, 14 November 2015: 2).

Ironisnya, keyakinan itu terus dipelihara, bahkan Jokowi kembali gagal menunjukkan sikap memegang komitmennya bahwa menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik dan membentuk pemerintahan profesional bukan bagi-bagi kursi. Kekhawatiran pemerintahan kembali mengalami “gunjangan” serta persiapan di tahun politik menjelang Pilpres 2019, menjelaskan realitas bahwa Jokowi menunjukkan kelonggaran (dalam *reshuffle* keempat) setelah memperbolehkan dua menteri dari Partai Golkar untuk merangkap jabatan di partai politik yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto merangkap sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Pilihan sikap Jokowi ini sejalan dengan kesepakatan Partai Golkar yang menyatakan mendukung Jokowi untuk kembali maju sebagai capres dalam Pilpres 2019.

Di sisi lain, Presiden Jokowi tidak mendepak PAN dari kabinet kerja, meski PAN sering tak sejalan dengan program Presiden Jokowi, seperti menolak pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) dan menolak penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi undang-undang (Koran Tempo, 2 November 2017). Meski pada akhirnya, Asman Abnur menteri dari PAN memilih mundur sebagai Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) atas inisiatif sendiri, bukan instruksi partainya, padahal PAN sudah memilih mendukung koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

dalam Pemilu Serentak 2019, (Kompas, 18 November 2006).

Perluasan Koalisi untuk Kepentingan Pemerintahan

Pergeseran peta koalisi mulai dari Pilpres, pembentukan kabinet hingga koalisi di DPR, menunjukkan pergeseran sikap partai seiring dengan dinamika isu dan kesempatan politik yang tersedia. Meski, dengan tema yang berbeda, seperti pada pasca Pemilu 2019 lalu, ketika polarisasi masyarakat atas dua kubu pasangan calon yang bertarung dalam “*rematch*” Prabowo dan Jokowi, maka yang menyelimuti kekhawatiran Jokowi sebagai presiden terpilih adalah lagi-lagi gangguan dalam memimpin pemerintahan. Akhirnya keputusan yang anomali dalam kompetisi di era demokrasi menjadi pilihannya yakni mengajak rivalnya dalam pertarungan ulangan Pilpres tersebut untuk bersama-sama sebagai pendukung pemerintah dengan memberikan kompensasi dua kursi jabatan menteri kepada Gerindra. Bukan hanya Gerindra, PAN juga pada akhirnya turut bergabung dalam Pemerintahan, sehingga menyisakan dua partai semata yakni PKS dan Partai Demokrat. Kedua partai itu tentu tak mungkin dapat mengganggu pemerintahan yang didukung kekuatan sebesar 81,91 persen.

Gaya memerintah presiden Jokowi yang akomodatif yang cenderung transaksional tak bisa dihindari, karena bagi Presiden hal itu dianggap sebagai jalan keluar dari problematika sistem presidensial dengan sistem multipartai. Padahal permasalahan ini terjadi lebih disebabkan oleh lemahnya karakter diri presiden dalam persepsi dirinya ketika berhadapan dengan legislatif. Akhirnya, merasa belajar dari pengalaman menghadapi gangguan di Senayan pada periode pertama pemerintahannya, yang kala itu sangat mengganggu ruang gerak pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan, sehingga upaya memperluas dukungan dalam koalisi pemerintahan dianggap menjadi pilihan yang dianggap bijak.

Semestinya Presiden Jokowi lebih percaya diri dengan modal *electoral support* sebesar 65,13 persen yang didapat di dalam Pilpres 2019 lalu, juga dukungan partainya yakni PDI Perjuangan sebesar 19,33 persen dengan 128 kursi legislator. Sehingga semestinya Presiden Jokowi tidak perlu harus pusing memperluas koalisi untuk mengamankan parlemen. Akhirnya, pola koalisi dari pendukung pemerintah menjadi salah kaprah karena paradigma yang dibangun adalah “bagi-bagi jabatan” semata, yang semestinya digunakan adalah preferensi politik dari partai politik pendukung yang sepakat dengan agenda kebangsaan dari presiden terpilih tersebut.

Kecenderungan itu menunjukkan bahwa partai-partai politik cenderung bersifat pragmatis. Pilihan pragmatisme politik ini terkait pula antara lain, dalam upaya partai politik mendanai kelangsungan hidupnya, dengan kata lain, tidak ada kemandirian partai. Sisi lain juga suatu kebutuhan pencitraan partai, yaitu sikap partai politik digerakkan oleh dorongan elektoral dalam pasar politik, sehingga akhirnya bergabung sebagai partai-partai pendukung pemerintah. Implikasi lainnya dari koalisi yang bersifat pragmatis seperti ini, adalah tidak munculnya kompetisi antarpolitical di parlemen, sehingga tidak tampak perjuangan ideologis partai politik dalam memengaruhi, mengubah, ataupun membentuk kebijakan. Inilah situasi yang terus terjadi dari era pemerintahan SBY hingga pemerintahan Jokowi sekarang ini, wajar jika dianggap partai politik kita mengambil bahasa Eep Saefulloh adalah sedang mengalami gejala “partai mengambang” (*floating party*), perwujudan partai politik tumbuh dengan kaki lemah di masyarakat (Kompas, 18 November 2006).

Sehingga, kinerja kepemimpinan dirinya pada periode keduanya menyebabkan terjadinya kemunduran demokrasi. Pemerintahan Jokowi juga pada akhirnya terjerumus pelan-pelan berubah menjadi otoriter. Presiden

kehilangan pengawas yang semestinya dilakukan oleh Parlemen, disebabkan parlemen kecenderungan terbesar selalu mengikuti apa maunya presiden dan ini tentu saja logika dari kemunduran demokrasi yang sedang dipilih dan diterapkan oleh Presiden Jokowi.

Munculnya partai-partai politik bergerak bergabung dalam lingkaran kekuasaan menunjukkan bahwa terjadi penurunan identifikasi pemilih partai, yang berdampak terhadap penurunan kepercayaan terhadap partai politik. Tentu saja akhirnya, melemahnya ikatan antara partai politik dan pengikut akan menimbulkan volatilitas yang lebih tinggi dalam pemilu. Wajar akhirnya dalam pemilu, para pemilih semakin *enggan* untuk mengidentifikasi diri dengan partai politik yang sama selama suatu siklus pemilihan, dan terdapat kecenderungan yang kuat untuk mengubah identifikasi mereka dari pemilihan ke pemilihan (Lili Romli, 2017: 14). Ini dibuktikan dengan realitas dampak dari hal itu, bahwa pada Pemilu 1999 pemenangnya adalah PDIP, Pemilu 2004 Partai Golkar, Pemilu 2009 Partai Demokrat, dan Pemilu 2014 dan 2019 pemenangnya PDIP. Lemahnya identifikasi partai ini juga bisa dilihat dalam pemilihan, seperti Pilpres maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hal mana kandidat yang diusung oleh partai tertentu belum tentu didukung oleh pemilih tersebut.

Jika demikian, ternyata ayunan dari sistem presidensial dengan kombinasi sistem multipartai yang terjadi di era kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi maupun pemerintahan SBY (sebelumnya) yang mana untuk menghindari terjadinya *deadlock* malah terjadinya pengupayaan memperluas koalisi pendukung kekuasaan, yang juga tak bisa dilepaskan dari lemahnya orientasi partai-partai politik di Indonesia. Situasi ini juga terjadi karena ketidakpercayaan diri seorang Presiden yang dapat memerintah dengan dukungan *electoral support* yang tinggi, dengan tentu tak perlu terlalu mencemaskan dukungan *political*

support. Nyatanya, ayunan sistem presidensial dengan sistem multipartai yang tidak kompatibel ini juga disertai dengan perilaku Presiden SBY dan Presiden Jokowi yang lebih membutuhkan dukungan koalisi di pemerintahan, akhirnya pemerintahan terjebak kepada kepentingan bagi-bagi kekuasaan semata untuk mengakomodir kepentingan memperluas dukungan koalisi.

Pengelolaan Pemerintahan Semakin Pragmatis

Jokowi adalah Presiden yang terpilih hingga dua kali masa jabatannya, sama seperti SBY. Jokowi adalah Presiden Indonesia ke-7, sama seperti SBY, Jokowi juga *a leader by constitution*. Menurut catatan Tjipta Lesmana bahwa gaya kepemimpinan Jokowi merupakan antitesis dari kepemimpinan penguasa politik Indonesia. Jokowi memang pemimpin yang keluar dari “pakem” penguasa politik di Indonesia. Di awal kepemimpinannya Jokowi dianggap sebagai sosok yang merakyat, senang turun langsung melalui aksi blusukannya ke kampung-kampung kumuh dan senang *becak*, sederhana penampilannya dalam tutur kata maupun kehidupannya, (Tjipta Lesmana, 2014).

Sejak keagalannya pada periode pertama dalam mempertahankan komitmennya bahwa menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai pemimpin partai politik, dan juga akan membentuk pemerintahan profesional bukan bagi-bagi kursi. Sangat jelas terlihat bahwa pemerintahan kedua Presiden Jokowi sekarang ini, malah menunjukkan pemerintahan dikelola dengan semakin pragmatis, sehingga Pemerintahan Jokowi sempat ditunjuk sebagai lakon utama dari kemunduran demokrasi yang terjadi di negeri ini pada tahun 2020 lalu (meski pada tahun 2021 mengalami perubahan positif). Presiden Jokowi bukan saja tetap tetapi semakin teguh dalam menjalankan politik akomodasi (politik balas jasa) dan transaksi, bahkan pemerintahan Jokowi malah menunjukkan karakter pemerintahan yang lemah utamanya adalah personal Jokowi sendiri sebagai presiden jika

kita membandingkan dengan periode pertamanya.

Dikatakan pemerintahan saat ini berkarakter lemah, sebab penunjukkan menteri yang semestinya merupakan hak prerogatif Presiden, menjadi sekadar berbagi kursi semata, apalagi Jokowi hingga sampai meminta maaf karena tidak bisa mengakomodir semua pihak dalam penyusunan kabinet. Jokowi mengungkapkan setidaknya ada 300 nama calon dari kebutuhan menteri sebanyak 34 orang, (merdeka.com, 26 Oktober 2019). Pengisian jabatan menteri masih berdasarkan dua kategori yakni penempatan dari kalangan profesional dan utusan partai politik. Pada komposisi menteri periode kedua ini dari utusan partai politik mengalami kenaikan dari segi jumlah kader yang ditempatkan dan juga jumlah komposisi partai pendukung pemerintah. Periode kedua ini tepatnya pada awal pembentukan menteri, komposisi menteri seimbang 17 dari unsur partai politik dan 17 dari unsur profesional, ini menunjukkan penurunan jumlah untuk profesional dari 19 menteri menjadi 17 orang pada 2014 lalu. Penambahan komposisi jumlah partai pendukung bertambah dari 5 partai politik menjadi 7 partai politik pendukung pemerintah pada 2019 kemarin.

Realitas dari satu setengah tahun Presiden Jokowi misalnya, Presiden dalam mengamankan dukungannya di legislatif, maka Presiden (dalam praktik informal) mempunyai “senjata pamungkas” berupa mekanisme “bagi-bagi rezeki” (*pork barrel*), inilah yang dilakukannya, (Leo Agustino, 2015: 389). Dengan bergabungnya Gerindra, dan juga diikuti oleh PAN turut menjelaskan terjadinya upaya memberangus peran oposisi yang pada akhirnya peran *check and balance* tidak berjalan di Parlemen. Partai yang berada di luar pemerintahan hanya menyisakan dua partai yakni: PKS dan Partai Demokrat, dengan jumlah kekuatan hanya 18,09 persen, berbeda dengan kekuatan pemerintah sebesar 81,91 persen. Dengan bergabungnya Partai Gerindra dan PAN sebagai bagian partai pendukung pemerintah menjadikan langkah yang ditempuh oleh Presiden Jokowi menghasilkan persepsi bahwa Indonesia tidak mengenal

oposisi, bahkan demokrasi di Indonesia dikatakannya adalah demokrasi gotong royong, (detik.com, 24 Oktober 2019).

Pola pengakomodiran dengan “bagi-bagi jabatan” juga tidak hanya dilakukan oleh Presiden Jokowi pada kursi menteri di kabinet. Tetapi Presiden Jokowi juga menambah komposisi jumlah wakil menteri dengan prosentase sebesar 300 persen, dari sebelumnya 3 wakil menteri menjadi 12 wakil menteri, ternyata jumlah jabatan wakil menteri semakin meningkat hingga mencapai 15 kursi wakil menteri. Hanya saja, masih tersisa 10 kursi wakil menteri yang masih kosong. Penalaran sederhana, memang menampakan bahwa pembagian kursi (jabatan) lebih kepada antrian pada tokoh atau partai politik kontributor kemenangan di Pilpres sebelumnya.

Presiden Jokowi di periode keduanya menyatakan di awal kembali dirinya siap berkompetisi bahwa ia tanpa beban, ternyata “tanpa beban dalam membagi-bagi kursi.” Jokowi sangat terkesan malah telah tersandera oleh elite-elite politik dalam penentuan kabinet 2019-2024. Politik akomodatif yang dilakukan oleh Jokowi juga menunjukan bahwa ia semakin memperpanjang budaya politik balas-jasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa dan loyal kepada dirinya.

Gaya memerintah presiden Jokowi yang akomodatif yang cenderung transaksional, juga dilakukan sebelumnya oleh Presiden SBY. Sehingga mengesankan pilihan transaksional adalah langkah politik yang tak bisa dihindari, karena dianggap sebagai jalan keluar dari problematika sistem presidensial dengan sistem multipartai. Padahal permasalahan ini terjadi lebih disebabkan oleh lemahnya karakter diri presiden dalam persepsi ketika berhadapan dengan legislatif. Akhirnya, merasa belajar dari pengalaman menghadapi gangguan di Senayan pada periode pertama pemerintahannya, juga telah mempelajari pengelolaan pemerintahan dari Presiden sebelumnya yakni SBY, yang kala itu ruang gerak pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan begitu terecoki oleh partai-

partai di parlemen. Sehingga upaya memperluas dukungan dalam koalisi pemerintahan dianggap menjadi pilihan yang dianggap bijak. Di sisi lain, persepsi Presiden dalam membangun kekuatan di masyarakat juga dilakukan dengan turut membagi kursi jabatan menteri dan wakil menteri kepada yang telah berjasa dalam ia meraih kekuasaan keduanya, singkatnya pemerintahan dikelola dengan lebih mengedepankan mengamankan kekuasaan pemerintah.

Semestinya dalam sistem presidensial antara legislatif dan eksekutif adalah dua institusi yang terpisahkan tak seperti di sistem parlementer. Sehingga jika logika berpikir untuk membangun koalisi besar dianggap jalan keluar, maka secara tidak langsung menunjukkan sosok presiden yang memerintah saat ini bukanlah sosok presiden yang memiliki kepemimpinan yang kuat. Pola koalisi akhirnya juga menunjukkan salah kaprah karena paradigma yang dibangun adalah “bagi-bagi jabatan” semata, yang semestinya digunakan adalah preferensi politik dari partai politik pendukung yang sepakat dengan agenda kebangsaan dari presiden terpilih tersebut. Kondisi ini pada akhirnya yang menjerumuskan presiden Jokowi pelan-pelan berubah menjadi otoriter. Presiden kehilangan pengawas yang semestinya dilakukan oleh Parlemen, disebabkan parlemen kecenderungan terbesar selalu mengikuti apa maunya presiden dan ini tentu saja logika dari kemunduran demokrasi yang sedang dipilih dan diterapkan oleh Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, semestinya Presiden Jokowi harus lebih percaya diri dengan modal *electoral support* sebesar 65,13 persen yang didapat di dalam Pemilu Presiden 2019 lalu, juga dukungan partainya yakni PDI Perjuangan sebesar 19,33 persen dengan 128 kursi legislator. Semestinya tidak perlu harus pusing memperluas koalisi untuk mengamankan parlemen. Akhirnya yang terjadi seperti sekarang presiden tersandera oleh kepentingan partai-partai dalam koalisi, contoh yang

kurang bijak dilakukan oleh Presiden SBY kembali dilakukan oleh Presiden Jokowi.

KESIMPULAN

Pengelolaan pemerintahan dengan jalan koalisi “tambun dan obesitas” menjadi konsekuensi dari diterapkannya sistem presidensial dan multipartai, ini ditunjukkan oleh dua pemerintahan yang menjadi penelitian yakni Presiden SBY dan Presiden Jokowi. *Electoral support* dianggap tidak dapat menyelesaikan permasalahan, sehingga membutuhkan *political support* yang pada akhirnya pemerintahan malah terjebak kepada pengelolaan pemerintahan untuk pengakomodiran semata berupa bagi-bagi jabatan.

Pilihan partai bergabung sebagai pendukung pemerintahan turut didasari bukan saja kebutuhan pencitraan politik berdasarkan dorongan elektoral dalam pasar politik, tetapi juga dalam upaya partai politik tersebut mendanai kelangsungan hidupnya. Sehingga, pola memperbesar dukungan yang berkembang dalam terbentuknya koalisi, juga tak bisa dilepaskan terjadi karena merupakan bagian dari upaya institusionalisasi kekuasaan dan materi yang dilakukan oleh pemerintah utamanya oleh Presiden Jokowi dan Presiden SBY.

Koalisi yang bersifat pragmatis ini tentu berdampak terhadap tidak munculnya kompetisi antarpolisi politik di parlemen. Sehingga tidak tampak perjuangan ideologis partai politik dalam memengaruhi, mengubah, ataupun membentuk kebijakan, serta pengawasan DPR terhadap pemerintah menjadi lunak. Tetapi ini adalah pilihan Presiden Jokowi agar memperoleh *political support* tidak semata *electoral support*. Inilah situasi yang terus terjadi dari era pemerintahan SBY hingga pemerintahan Jokowi sekarang ini, terjadinya pragmatisme dalam koalisi politik dan perilaku kepemimpinannya memerintah.

Proses koalisi dalam Pemilu Serentak 2019 yang menghasilkan “pertarungan ulang” antara Jokowi dan Prabowo, malah

menimbulkan anomali dalam pengelolaan kekuasaan. Presiden Jokowi mengajak rivalnya untuk bergabung dalam pemerintahan. Koalisi dalam Pemilu Serentak 2019 lalu, lagi-lagi tidak menghasilkan terjadinya koalisi jangka panjang yang dapat menghasilkan penyederhanaan partai politik. Realitas ini juga ditopang fakta, politik transaksional dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengajak Partai Gerindra bergabung dalam Pemerintahannya. Disertai, dengan langkah terakhir memberangus koalisi melalui mengakomodir PAN yang ingin bergabung dalam pemerintahan. Akhirnya, pengupayaan pelembagaan koalisi atas dasar *platform* politik yang bersifat permanen, yang semestinya merupakan salah satu agenda yang tak kalah penting, cenderung kembali terabaikan dalam setiap gelaran pilpres.

Meskipun koalisi hanya lazim dikenal dalam konteks demokrasi parlementer, namun dalam skema sistem presidensial berbasis multipartai. Koalisi merupakan kebutuhan yang tak terelakkan, karena hampir selalu muncul potensi terpilihnya “presiden minoritas,” yakni presiden dengan basis politik minoritas di parlemen. Kendati begitu, koalisi politik tersebut semestinya bukan koalisi semu dengan kontrak politik longgar dalam rangka pembagian kekuasaan (khususnya kursi kabinet) belaka, melainkan suatu koalisi permanen melalui kontrak politik yang benar-benar dipersatukan oleh ikatan kesamaan secara ideologis ataupun program kerja. Namun demikian, dalam realitasnya selama delapan belas tahun, dari dua periode (satu dekade) pemerintahan Presiden SBY dan delapan tahun lebih kepemimpinan Presiden Jokowi, pengelolaan sistem pemerintahan Indonesia dijalankan berdasarkan politik transaksional dengan pengupayaan penguatan koalisi pendukung pemerintah. Ini terjadi disebabkan oleh belum kompatibelnya antara sistem kepartaian bersifat multipartai dengan sistem pemerintahan yang bersifat presidensial. Realitas lainnya adalah personal presiden

sendiri yang teramat mengkhawatirkan kepemimpinan dan pemerintahannya akan diganggu oleh oposisi yang menyebabkan pemerintahan koalisi “tambun dan obesitas” dianggap pilihan rasional.

Oleh karena itu, saran yang diajukan adalah: perlunya desain upaya Penguatan Sistem Presidensial dengan kerangka peningkatan dukungan politik yang memadai di legislatif dan penyederhanaan partai secara alamiah. Sehingga demikian, upaya mendesain penguatan sistem presidensial secara komprehensif merupakan pilihan yang wajib disegerakan untuk dipikirkan dan dibahas, seperti perlunya dipikirkan pengaturan mekanisme koalisi yang bersifat ideologis dan sebagainya, sehingga diperoleh formula mekanisme penerapannya yang baik bagi perjalanan demokrasi di Indonesia ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, Satu Tahun Pemerintahan Jokowi: Transaksional dan Transformasional, dalam Analisis CSIS, Vol. 44, No. 4, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi), (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Denzin, Norman K., dan Lincoln, Yvonna S., Handbook of Qualitative Research, terjemahan Dariyatno, at.all, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).
- Erwanti, Marlinda Oktavia, Jokowi: Di Indonesia Tak Ada Oposisi, Demokrasi Kita Gotong Royong, dalam <https://news.detik.com/berita/d-4758805/jokowi-di-indonesia-tak-ada-oposisi-demokrasi-kita-gotong-royong>.
- Fatah, Eep Saefulloh, “Gejala Partai Mengambang,” dalam *Kompas*, 18 November 2006.
- Indrayana, Denny, *Indonesia Optimis*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2011).
- Mashabi, Sania, Jokowi Minta Maaf Tak Bisa Mengakomodir Semua Pihak Masuk Kabinet Indonesia Maju, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-minta-maaf-tak-bisa-mengakomodir-semua-pihak-masuk-kabinet-indonesia-maju.html>.
- Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).
- Musaharun, Istman, dan Prasongko, Dias, “Jokowi Belum Berniat Depak PAN,” *Koran Tempo*, 2 November 2017.
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).
- Romli, Lili, Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia: Problematik Institusionalisasi Partai Politik di Era Reformasi, (Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2017).
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Tjipta, Lesmana, “Tuna-Empati: Kelemahan Utama Pemimpin Indonesia, dalam Jurnal Politika, Menimbang Kepemimpinan Politik,” Vol. 10, No. 1, Tahun 2014.
- Tribun, “Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintah: KIH Ganti Nama Jadi P4,” *Warta Kota*, 14 November 2015